

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afreetamara, N. W., & Pujiyono, . (2019). Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 243. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43014>
- Asikin, Z. (1991). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rajawali Pers.
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia* (A. Zainal (ed.); 1 ed.). Pustaka Reka Cipta.
- Badher, J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maj.
- Besse Kartoningrat, R. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. *Horlev*, 2(1).
- Fajar Santosa, A. (2007). Analisa Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Alumni Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata*, 11, 141.
- Kurniawan, A. R., Busroh, F. F., & ... (2021). Hak Imunitas Kurator Dalam Eksekusi Harta Debitor Pailit. *Disiplin: Majalah Civitas ...*, 27, 64–73.
- Lie, G., Gunadi, A., & Michiel, A. (2019). Problematik UU No. 37 Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2.

- Muljadi, K. (2005). *Prosiding Rangkaian Likakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Ras Ginting, E. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Tarmizi (ed.); 1 ed.). Sinar Grafika.
- Remy, S. (2019). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Prenadamedia Group.
- Rinawati, A. (2020). Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme Global. *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972>
- Ruslan, A. (1998). *Pancasila dan Reformasi*.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Yustia, R. D. A., & Rachmie, S. (2024). Panduan Penulisan Penyusun Penulisan Hukum (Tugas Akhir). In *Universitas Pasundan*. Universitas Pasundan.
- Zulkarnain, M. (2017). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Universitas Islam Indonesia*, 1.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dan Kepailitan

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

C. Jurnal

Dan, H. K., Sulisrudatin, N., & Ip, S. (2014). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.1 No.3, 158–173. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>

Fidiastuti, R., & Rizkianti, W. (2023). Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi). *National Conference on Law*. Vol.2 No.3.

Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, Vol.3 No.2, 146–153. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7844>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7844/7408>

Putra, I. M. D. A., & Sukihana, I. A. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.4. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/42623-1033-88103-1-10-20181002.pdf>

- Simalango, M. (2017). Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5.No.1, 53–64.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vo.4 No.3, 130.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>
- Yolanda, D. C. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst). *Binamulia Hukum*, Vol.2 No.2, 187–197.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.82>